

Dominasi Aktor Lokal dalam Collaborative Governance: Studi pada Program Kampung Iklim (ProKlim)

¹Trio Saputra, ²Karmila Sari, ³Sulaiman Zuhdi, ⁴Eka, ⁵Wasiah Sufi

¹²³⁴⁵Universitas Lancang Kuning

Korespondensi : trio_saputra@unilak.ac.id

Abstrak

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan inisiatif nasional yang menekankan partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Secara konseptual, program ini dirancang berbasis collaborative governance, yang mengharuskan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara konsep normatif collaborative governance dengan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam Program Kampung Iklim di Kelurahan Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada model proses kolaborasi menurut Chris Ansell dan Alison Gash yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, dan hasil sementara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ProKlim telah terbentuk, namun belum berjalan secara optimal dan cenderung didominasi oleh aktor lokal. Keterlibatan pemerintah di tingkat kota masih terbatas, sehingga kolaborasi belum terintegrasi secara menyeluruh. Meskipun program menunjukkan capaian positif, seperti keberlanjutan kegiatan dan perolehan penghargaan, keberhasilan tersebut lebih banyak ditopang oleh partisipasi masyarakat dibandingkan hasil kolaborasi yang terstruktur. Adapun faktor penghambat utama meliputi keterbatasan dukungan anggaran pemerintah, minimnya sosialisasi yang berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan anggaran, meningkatkan intensitas sosialisasi, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, diperlukan institusionalisasi mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar implementasi ProKlim dapat mencerminkan praktik collaborative governance yang efektif dan ideal

Kata kunci : ProKlim, Collaborative Governance, Kethanan Iklim.

Abstract

The Climate Village Program (ProKlim) is a national initiative that emphasizes multi-stakeholder participation in climate change adaptation and mitigation efforts at the local level. Conceptually, this program is designed based on collaborative governance, which requires synergy between the government, communities, and other relevant actors. However, in practice, there is still a gap between the normative concept of collaborative governance and its implementation in the field. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the Climate Village Program in Tobek Godang Village, Pekanbaru City. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The research analysis refers to the collaborative process model by Chris Ansell and Alison Gash, which includes face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, shared understanding, and interim results. The results show that collaboration between stakeholders in the implementation of ProKlim has been established, but has not been running optimally and tends to be dominated by local actors. Government involvement at the city level is still limited, so collaboration has not been fully integrated. Although the program shows positive achievements, such as the sustainability of activities and the acquisition of awards, this success is supported more by community participation than the results of structured collaboration. The main inhibiting factors include limited government budget support, minimal outreach resulting in low public understanding, and limited human resources, particularly experts. The implications of this research emphasize the need to strengthen the role of local governments

in providing budget support, increasing the intensity of outreach, and developing human resource capacity. Furthermore, the institutionalization of more structured and sustainable collaboration mechanisms is needed so that ProKlim implementation can reflect effective and ideal collaborative governance practices..

Keyword: ProKlim, Collaborative Governance, Climate Resilience

1. PENDAHULUAN

Upaya pengendalian perubahan iklim yang dilaksanakan secara global, merupakan salah satu agenda prioritas dunia untuk menyelamatkan kehidupan di bumi dan mengamankan keberlanjutan pembangunan nasional. Guna tercapainya target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, seluruh pemangku kepentingan terlibat secara aktif (KLHK, 2017)

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tanggal 1 Desember 2016. ProKlim sebagai Gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas merupakan respon terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi. ProKlim memuat aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh kelompok masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan iklim dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca atau berkontribusi menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C seperti tertuang dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) pada tahun 2015 (KLHK, 2017).

ProKlim dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. ProKlim dilaksanakan di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa (KLHK, 2017).

Landasan hukum ProKlim adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, dan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Tumbuhnya ProKlim melalui pengayaan inovasi program adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan secara kolaborasi antara pemerintah (*party*) dengan “*Non Party Stakeholder*”.

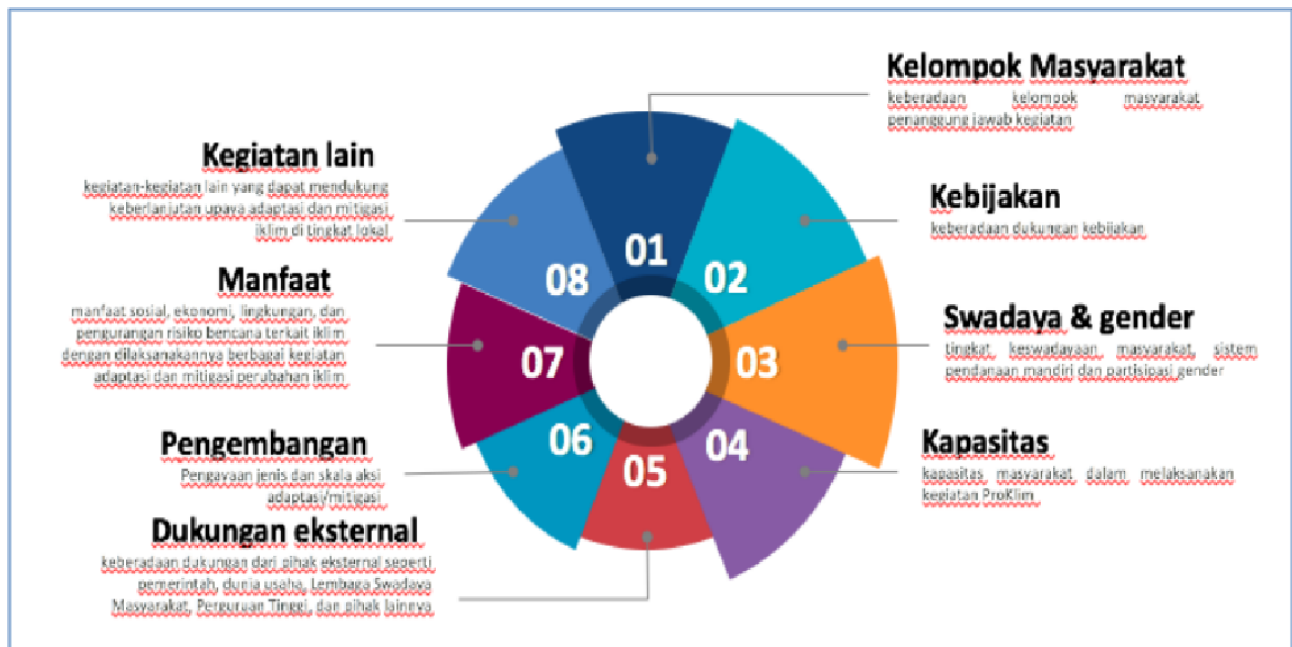
Komponen utama ProKlim adalah Adaptasi dan Mitigasi dimana masing-masing komponen memiliki kegiatan, yaitu :

1. Adaptasi
 - a) Pengendalian Kekeringan, Banjir dan Longsor
 - b) Peningkatan Ketahanan Pangan
 - c) Penanganan atau Antisipasi Kenaikan Muka Laut, Rob, Intrusi Air Laut, Abrasi, Ablasi atau Erosi Akibat Angin, Gelombang Tinggi
 - d) Pengendalian Penyakit terkait Iklim.
2. Mitigasi
 - a) Pengelolaan Sampah, Limbah Padat dan Cair
 - b) Penggunaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
 - c) Budidaya Pertanian Rendah Emisi GRK
 - d) Peningkatan Tutupan Vegetasi
 - e) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

(Sumber : ditjenppi.menlhk.go.id)

Pelaksanaan ProKlim mengedepankan aspek keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, baik

dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan pada lokasi kampung iklim. Melalui pendekatan ini komitmen dan motivasi masyarakat akan meningkat, serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap program/kegiatan yang berjalan. Mempertimbangkan pentingnya hal tersebut, maka komponen kelembagaan dan dukungan keberlanjutan seperti yang diuraikan dalam gambar dibawah ini mempunyai bobot 40% dari total penilaian pada saat dilakukan evaluasi pengusulan ProKlim.



Gambar 1. Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan ProKlim

ProKlim merupakan kegiatan berbasis komunitas pada tingkat tapak yang berkelanjutan sehingga penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan ProKlim. Kelompok masyarakat yang terdapat pada lokasi ProKlim merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak (Saputra, Trio dkk, 2024).

Kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ProKlim tidak hanya kelembagaan tingkat tapak, namun juga kelembagaan yang terdapat di tingkat kabupaten/kota/provinsi (Dinas Lingkungan Hidup) hingga Pemerintah (KLHK) termasuk unit pelaksana teknis yang secara langsung bertanggungjawab dalam ProKlim. Hal lain yang menjadi penilaian terkait aspek dukungan keberlanjutan misalnya seperti tingkat keswadayaan masyarakat, kemampuan untuk membangun jejaring kerja dengan pihak eksternal yang dapat mendukung keberlanjutan program, dan penerapan nilai-nilai tradisional yang mendukung upaya adaptasi/mitigasi perubahan iklim.

ProKlim merupakan program yang berlingkup nasional dikelola secara langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Kemudian selanjutnya untuk pedoman pelaksanaan diatur oleh Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Dalam Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim No. 4 Tahun 2021 Pasal 1 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim disebutkan bahwa program kampung iklim ditingkat daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah menurut asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Jadi, pemerintah

pusat dalam tugas pembantuan program kampung iklim ini berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk, serta biaya. Disebutkan juga dalam Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim No. 4 Tahun 2021 bahwa coordinator proklam ditingkat provinsi/kabupaten/kota adalah penanggung jawab oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan bertugas mengkoordinasi penguatan pelaksanaan proklam dan penilaian proklam secara nasional.

Program Kampung Iklim (ProKlim) telah berjalan selama satu dekade sejak dicanangkan pada tahun 2012. Hingga tahun 2021 telah terdaftar sebanyak 3.270 lokasi Program Kampung Iklim di seluruh Indonesia. Adapun Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Riau pada tahun 2022 telah terdaftar sebanyak 63 lokasi yang terdiri dari 2 lokasi mendapatkan Trofi ProKlim Utama, Sertifikat ProKlim Utama sebanyak 18 lokasi, ProKlim Madya sebanyak 33 lokasi dan ProKlim Pratama sebanyak 10 lokasi, sedangkan untuk di Kota Pekanbaru hanya terdapat 1 lokasi yaitu Kelurahan Tobek Godang dari 83 Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.

(Suci Fitria, 2022)

Kelurahan Tobek Godang adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Dibentuk berdasarkan surat keputusan Walikota Pekanbaru sesuai peraturan daerah (Perda) Nomor 4/2016 yang sudah disahkan DPRD, tanggal 29 April 2016 sumber LD 2016 /no.5. Pemecahan dari dua kelurahan yaitu, Kelurahan Delima dan Kelurahan Simpang Baru, maka dilantiklah Lurah Tobekgodang pada tanggal 7 Januari 2017 dan dimekarkan kembali berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan di Kota Pekanbaru. Motto Kelurahan Tobek Godang yaitu “BERSIH, TERTIB, TRANSPARANSI, DAN INTEGRITAS”. Kelurahan Tobek Godang memiliki luas 9,51km² dengan jumlah penduduk sebanyak 26.061 jiwa, Kelurahan Tobek Godang dibagi menjadi 73 RT dan 15 RW. Kondisi iklim cuaca di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya mengikuti iklim Kota Pekanbaru pada umumnya yang beriklim sangat basah, musim hujan terjadi pada bulan Januari-April dan September-Desember. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Agustus (Nurpeni dkk, 2022).

Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, satu-satunya kelurahan di Kota Pekanbaru yang masuk nominasi Program Kampung Iklim (Proklam) pada 2020 untuk tingkat nasional sesuai surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Pengendalian Iklim KLHK. Kelurahan Tobek Godang telah memperoleh sertifikat Proklam Utama berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 401/MENLHK/PPI/PPI.0/10/2020 tentang penerima penghargaan Proklam pada tanggal 19 Oktober 2020.

Lalu pada 15 Oktober 2021 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru kembali menerima Sertifikat Proklam Utama dari Kementrian LHK melalui surat pemberitahuan bernomor UN.116/PPI/API/PPI.0/10/2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dhewanthi. Kelurahan Tobek Godang yang menerima sertifikat Program Kampung Iklim dengan kategori ProKlim utama yaitu pada RW 02 dan RW 03.

Tabel 1.1 Kegiatan pendukung Program Kampung Iklim (ProKlim)

No	Kegiatan	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	Adaptasi	-Pemanen air hujan -Peresapan air -Penghematan penggunaan air -Penerapan pola tanam untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim -Sistem pertanian untuk mengatasi kegagalan panen dan ketersediaan pangan	-Embung/DAM/Waduk Penampungan Air Hujan (PAH) / Instalasi Penampung Air Hujan (IPAH) -Biopori -Sumur resapan -Rorak / Jogangan -Penggunaan kembali air yang sudah dipakai untuk keperluan tertentu -Pembatasan penggunaan air -Penerapan pola tanam (padi-palawijaya-pola tanam berselang) -Pertanian terpadu -Pelestarian potensi pangan lokal
2	Mitigasi	-Pengelolaan sampah dan limbah padat -Penggunaan sumber energy no-EBT	-Pengumpulan -Perwadahan -Pemilihan sampah -Pengomposan -Kegiatan 3R -Dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA) -Dibuang ke lahan kosong -Dibakar -Penggunaan minyak tanah -Penggunaan LPG -Penggunaan Briket gambut -Penggunaan arang kayu

		-Penghematan energi -Budidaya pertanian rendah emisi GRK -Pengendalian karhutla	-Penggunaan tungku hemat kayu bakar, biji dan sekam -Penggunaan lampu hemat energi -Peningkatan pencahayaan alami rumah tangga -Luas penerapan pola -Penggunaan pupuk organik -Tidak bakar jerami di sawah -Peringatan dan deteksi dini -Pencegahan (patrol mandiri dan gabungan) -Kampanye pencegahan karhutla -Pemadaman -Tersedia sarana dan prasarana pengendali karhutla
3	Kelembagaan	-Nama lembaga -Struktur organisasi -Program kerja -Aturan organisasi -Sistem kaderisasi	

Sumber Data: Kelurahan Tobek Godang

Tabel di atas menjelaskan bahwa untuk memperkuat kegiatan Program Kampung Iklim dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan baik dalam kegiatan pertanian, kesehatan, ekonomi dan kegiatan kelompok sosial lainnya yang dapat memberikan nilai tambah penyempurnaan kegiatan Program Kampung Iklim dalam rangka menjaga ketahanan lingkungan di kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) menuntut adanya pendekatan *collaborative governance* yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya menyelesaikan permasalahan publik melalui sinergi dengan berbagai pihak terkait. Dalam perspektif administrasi publik, *collaborative governance* merupakan model tata kelola pemerintahan yang relatif baru, yang menekankan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses perumusan hingga implementasi kebijakan. Secara konseptual, kolaborasi (*collaborative*) dimaknai sebagai bentuk kerja sama antar aktor, organisasi, atau institusi untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara individual.

Sementara itu, *governance* merujuk pada proses penyelenggaraan kebijakan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pengambilan maupun pelaksanaan keputusan publik (Kurniawan, 2007). Dengan demikian, fokus *collaborative governance* terletak pada upaya mewujudkan keadilan sosial melalui pengelolaan kebijakan publik yang partisipatif dan inklusif.

Menurut Chris Ansell dan Alison Gash (2008) dan Saputra, Trio (2025), *collaborative governance* merupakan suatu pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, serta diarahkan pada formulasi dan implementasi kebijakan publik atau pengelolaan program dan aset publik.

Namun demikian, implementasi *collaborative governance* dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Tobek Godang belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari beberapa fenomena empiris, antara lain: (1) minimnya sosialisasi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, sehingga kegiatan lebih banyak berlangsung pada tingkat kelurahan; (2) keterbatasan dukungan pendanaan dari pemerintah, sehingga pembiayaan program didominasi oleh swadaya masyarakat, baik melalui kas kelurahan, hasil kegiatan ProKlim, maupun iuran warga; serta (3) keterbatasan sumber daya manusia, yang masih bertumpu pada perangkat kelurahan, RW, RT, dan masyarakat setempat. Kondisi tersebut menunjukkan belum terbangunnya kolaborasi yang ideal antar aktor sebagaimana yang diharapkan dalam konsep *collaborative governance*.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan (*research gap*) antara konsep normatif *collaborative governance* yang menekankan keterlibatan multi-aktor secara sinergis dan terstruktur, dengan realitas implementasi ProKlim di Kelurahan Tobek Godang yang masih bersifat parsial, terbatas pada aktor lokal, serta minim dukungan lintas level pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Tobek Godang, Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti serta menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menguraikan, merangkum, dan memahami berbagai kondisi, situasi, serta fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagai objek penelitian (Bungin, 2011).

Metode kualitatif dalam penelitian ini menekankan pada kualitas data yang diperoleh melalui informasi yang disampaikan oleh para informan yang relevan dengan fokus penelitian (Moleong, 2017). Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tobek Godang, Kota Pekanbaru, dengan informan yang terdiri dari: (1) Lurah Tobek Godang, (2) Ketua ProKlim Kelurahan Tobek Godang, (3) Kelompok Kerja (Pokja), (4) Ketua RW, dan (5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

Tahapan analisis data dilakukan secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis dengan cara dipelajari, ditelaah, serta diabstraksikan secara cermat agar menghasilkan temuan yang mendalam dan komprehensif. Menurut Idrus (2011), data kualitatif yang berjumlah besar perlu direduksi dan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu agar lebih mudah dianalisis. Proses ini mencakup penyimpanan data secara sistematis sehingga dapat dikonstruksikan kembali sesuai dengan tema yang sedang dianalisis.

Dalam penelitian ini, analisis data mengacu pada model yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan/verifikasi. Melalui tahapan tersebut, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan temuan penelitian secara sistematis berdasarkan konsep dan teori yang relevan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance Program Kampung Iklim (ProKlim) pada Kelurahan Tobek Godang

Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah Program berlingkup Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditingkat local sesuai dengan kondisi wilayah.

ProKlim berlandas pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, dan telah ditinjaulanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim, dimana terdapat komponen utama, syarat pengusulan, penilaian dan kategori ProKlim.

Kelurahan Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru merupakan satu-satunya Kelurahan di Kota Pekanbaru yang mendapatkan 6 kali penghargaan sertifikat ProKlim yaitu sertifikat proklum utama 3 kali dan sertifikat proklum madya 3 kali. Disini penulis menggunakan teori Ansell & Gash mengenai proses Collaborative yaitu tahapan membentuk kolaboratif terdiri dari sebagai berikut : 1. Dialog tatap muka (Face to face), 2. Membangun kepercayaan (Trust Building), 3. Komitmen terhadap proses (Commitment to process), 4. Berbagi pemahaman (Share Understanding), 5. Hasil sementara (Interim result). Adapun data dan hasil narasumber yang dilakukan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

Dialog tatap muka (Face to face)

Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari tatap muka secara langsung dari tiap *stakeholder* yang terlibat. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasi proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negosiasi yang apa adanya. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonism dan *disrespect* dari antar *stakeholder* yang terlihat, Sehingga *stakeholder* dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama.

Disini penulis menemukan proses kolaborasi yang dilakukan pada Program Kampung Iklim (ProKlim) Tobekgodang dilakukan oleh beberapa *stakeholder*, yaitu Lurah Tobekgodang, Kelompok kerja (POKJA), DLHK Kota Pekanbaru dan Masyarakat, adapun jawaban dari narasumber sebagai berikut.

Menurut Lurah Tobekgodang (H. Yasir Arafat, S. Sos) tentang Collaborative Governance ProKlim pada proses dialog tatap muka menjelaskan:

“Proses tatap muka mengenai program kampung iklim dilakukan antara saya sebagai lurah, kelompok kerja, DLHK Kota Pekanbaru dan masyarakat. Antara Kelurahan dan kelompok kerja selalu melakukan proses tatap muka dengan masyarakat pada saat rapat mengenai program ini dan juga sering dilakukan pada kegiatan-kegiatan lain seperti gotong royong, ibu-ibu PKK dll.” (16 Juni 2025)

Pada wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa proses tatap muka antara kelurahan dan masyarakat cukup sering dilakukan.

Menurut Kelompok kerja (POKJA) yang menangani program ini tentang proses tatap muka ProKlim :

“Proses tatap muka Program kampung iklim pada Kelurahan Tobekgodang selalu dilakukan pada saat ada kesempatan antara Kelurahan sebagai penggerak dan masyarakat sebagai penyelenggara.” (16 Juni 2025)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa proses tatap muka pada proklamasi sering dilakukan pada saat ada kegiatan yang melibatkan masyarakat, Sedangkan

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru mengenai proses tatap muka Proklamasi :

“Pertemuan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan pihak Kelurahan Tobekgodang ada dilakukan beberapa kali dan DLHK melakukan evaluasi tiap penerimaan sertifikat Proklamasi.” (3 Juli 2025)

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa proses tatap muka yang terjadi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan pihak Kelurahan dan masyarakat tidak terlalu intens dilakukan.

Membangun kepercayaan (Trust Building)

Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid, Membangun kepercayaan memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini.

Menurut Lurah Tobekgodang (H. Yasir Arafat, S.Sos) pada proses membangun kepercayaan:

“Pihak Kelurahan beserta kelompok kerja selalu menjelaskan kepada masyarakat bahwa program ini merupakan suatu program yang positif, karena pada Program kampung iklim ini terdapat kegiatan adaptasi dan mitigasi dimana dengan menjalankan program daerah kita insyaAllah akan terhindar dari dampak iklim seperti banjir.”(16 Juni 2025)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan kelurahan dapat membuat masyarakat mau bergerak dan ikut serta dalam program kampung iklim ini.

Menurut Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Tobekgodang:

“Mengenai transparansi dana program kampung iklim ini hanya mengandalkan dana dari Kelurahan dan belum mendapatkan bantuan dari pihak terkait.”

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tentang proses membangun kepercayaan:

“Sesuai dengan tujuan dibuatnya Program Kampung Iklim oleh kementerian, DLHK selalu meyakinkan kepada masyarakat bahwa program ini merupakan program yang sangat baik, terlebih lagi untuk tempat-tempat yang terdampak perubahan iklim, mengenai dana memang program kampung iklim ini belum mendapatkan dana dari pemerintah.”(3 Juli 2025)

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa program kampung iklim ini belum mendapat support dana untuk menyelenggarakan kegiatan.

Komitmen Terhadap Proses (Commitment to process)

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi, Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam collaborative governance, Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi, Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi, Komitmen merupakan tanggungjawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

Menurut Lurah Tobekgodang (H. Yasir Arafat, S.Sos) pada komitmen terhadap proses:

“Saya sebagai Lurah Tobekgodang beserta masyarakat berusaha menjalankan program ini dengan baik, kami membuat pembangunan fisik agar terhindar dari banjir seperti peresapan air, embung, saluran drainase dan tumpeng sari pada perkarangan rumah.”(16 Juni 2025)



Gambar 2. Pembangunan fisik berupa tumpang sari, menanam tanaman toga



Gambar 3. Pembangunan fisik berupa peresapan air, penampung air hujan/embung, saluran drainase/lorak
Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada komitmen terhadap proses:

“Kami DLHK menjalankan program kampung iklim dengan semaksimal mungkin sesuai dengan instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 67 Tahun 2020 tentang pembinaan, pendampingan dan penguatan lokasi program kampung iklim Kota Pekanbaru.” (3 Juli 2025)

Berbagi Pemahaman (Share Understanding)

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang dilakukan, Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, visi bersama dan lain-lain, saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memakai dan mengartikan sebuah masalah.

Menurut Lurah Tobekgodang (H. Yasir Arafat, S.Sos) pada berbagi pemahaman:

“Untuk berbagi pemahaman kami selalu melakukan rapat tentang proklamasi antara pihak kelompok kerja dan masyarakat, melalui sosialisasi maupun kegiatan fisik seperti gotong royong, dan kami selalu berupaya melakukan inovasi-inovasi terbaru agar kelurahan kami selalu bias mengikuti program kampung iklim” (16 Juni 2025)

Menurut Kelompok Kerja Program Kampung Iklim Kelurahan Tobekgodang mengenai komitmen terhadap proses:

*“Ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui bahwa adanya program kampung iklim ini, itu karena sosialisasi hanya banyak di lakukan di batas kelurahan, namun sosialisai yang dilakukan DLHK bias dikatakan minim”***(16 Juni 2025)**

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengenai komitmen terhadap proses:

*“Sosialisasi untuk membagikan pemahaman tentang program kampung iklim selalu kami sampaikan tiap tahun, baik secara langsung maupun tidak langsung.”***(3 Juli 2025)**

Wawancara dari beberapa narasumber diatas menjelaskan bahwa sosialisasi terhadap pemahaman tentang program kampung iklim terlihat banyak dilakukan antara pihak kelurahan dan masyarakat, sedangkan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota hanya melakukan sosialisasi beberapa kali dan sering dilakukan pada saat pergantian sertifikat saja.

Hasil Sementara (Interm Result)

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output yang nyata, Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi, Hasil sementara ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi.

Menurut Lurah Tobekgodang (H. Yasir Arafat, S.Sos) pada hasil sementara :

*“Setelah mendapatkan sertifikat ProKlim Utama pada tahun 2020 dan Madya pada tahun 2021 kami selalu berperan aktif melanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dan Alhamdulillah hampir tiap tahun selalu mendapatkan sertifikat ProKlim”***(16 Juni 2025)**

Tabel 1.2 Penerimaan Sertifikat ProKlim

NO	Tahun	Lokus	Kategori ProKlim
1	2020	RW. 01	Sertifikat ProKlim Utama
2	2021	RW. 02 dan RW. 03	Sertifikat ProKlim Utama
3	2022	RW. 07 dan RW. 16	Sertifikat ProKlim Madya
4	2023	-	Tidak ada
5	2024	RW. 07	Sertifikat ProKlim Madya

Sumber data: Kelurahan Tobekgodang

Wawancara dan data diatas menjelaskan bahwa kegiatan berkelanjutan dilakukan pada Kelurahan Tobekgodang.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengenai Hasil Sementara:

*“Pada program kampung iklim pemerintah kota Pekanbaru membuat kebijakan yaitu Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 67 Tahun 2020 mengenai pembinaan, pendampingan dan penguatan lokasi program kampung iklim kota pekanbaru, kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/MENLHK-SEKJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, dan Intruksi Gubernur Riau Nomor : 01/INT-HK/1/2017 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Provinsi Riau”***(3 Juli 2025)**

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dari program yang dicetus oleh Kementrian Lingkungan Hidup menimbulkan kebijakan-kebijakan baru ditingkat Provinsi dan dilanjutkan oleh tingkat Kota. Program ini menunjukkan capaian yang cukup positif, seperti perolehan sertifikat ProKlim secara

berkelanjutan serta kontribusi terhadap penurunan emisi di berbagai sektor. Namun, capaian tersebut lebih banyak didorong oleh inisiatif lokal dibandingkan hasil dari kolaborasi yang terstruktur dan sistematis antar pemangku kepentingan.

Temuan penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan (gap) antara konsep normatif *collaborative governance* dengan praktik empiris di lapangan. Secara teoritis, *collaborative governance* menuntut adanya keterlibatan aktif, setara, dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Namun, dalam konteks ProKlim di Kelurahan Tobek Godang, kolaborasi yang terjadi masih bersifat lokalistik, tidak terintegrasi, dan minim dukungan struktural dari pemerintah di tingkat atas. Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan konsep *collaborative governance* dalam konteks lokal, khususnya pada program berbasis masyarakat seperti ProKlim, dengan menekankan pentingnya dukungan institusional dan keberlanjutan interaksi antar aktor

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru telah menunjukkan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Namun, kolaborasi tersebut belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *collaborative governance* yang ideal, karena masih didominasi oleh aktor lokal serta belum terintegrasi secara kuat dengan pemerintah di tingkat kota. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara konsep normatif *collaborative governance* yang menekankan sinergi multi-aktor dan multi-level governance dengan realitas implementasi yang masih bersifat parsial. Meskipun demikian, program ini tetap menunjukkan capaian yang positif, seperti keberlanjutan kegiatan dan perolehan penghargaan ProKlim, yang sebagian besar ditopang oleh partisipasi aktif masyarakat. Adapun kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan dukungan anggaran pemerintah, minimnya sosialisasi yang berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah daerah, khususnya DLHK Kota Pekanbaru, memperkuat peran fasilitasi melalui penyediaan anggaran yang memadai, peningkatan intensitas sosialisasi dan koordinasi lintas aktor, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lokal. Selain itu, diperlukan upaya institusionalisasi mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar pelaksanaan ProKlim tidak hanya bergantung pada inisiatif lokal, tetapi juga didukung oleh sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan secara menyeluruh.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan *collaborative governance* pada Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, disarankan agar pelaksanaan program dapat dioptimalkan melalui penguatan peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, dalam mendukung kolaborasi lintas pemangku kepentingan. DLHK diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan dukungan anggaran yang memadai sebagai bentuk komitmen institusional terhadap keberlanjutan program, sehingga pelaksanaan ProKlim tidak hanya bergantung pada swadaya masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi secara berkelanjutan dan merata

kepada seluruh lapisan masyarakat, agar pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya program dalam menghadapi dampak perubahan iklim dapat meningkat.

Di samping itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui penambahan tenaga ahli serta pendampingan teknis yang berkelanjutan, sehingga implementasi program dapat berjalan lebih profesional dan efektif. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga perlu membangun mekanisme koordinasi dan kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan antar pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun supralokal, guna mengatasi kesenjangan kolaborasi yang selama ini masih bersifat parsial. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan ProKlim di Kelurahan Tobek Godang tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga mampu mencerminkan praktik *collaborative governance* yang ideal, inklusif, dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewi Atur Ekharisma, Maryono, Warsito Budi (2019) *Proceeding Biology Education Conference*, Vol. 16, No. 1, Hal 221-228
- [2] Faedlulloh, D., Irawan, B., & Prasetyanti, R. (2019). Program unggulan kampung iklim (proklm) berbasis pemberdayaan masyarakat. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 4(1). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i1.2364>
- [3] Hudaya Muhammad Reza, Dewi Titis Puspita (2021) *Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Talangbubuk, Kecamatan Plaju, Kota Palembang*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
- [4] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, *Road Map Program Kampung Iklim (Proklm)*, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Jakarta, 2017
- [5] M. Hafizul Furqan, Daska Azis dan Risma Wahyuni. 2020. Implementasi Program Kampung Iklim (Proklm) di Gampong Lambung Kecamatan Meureuxa Kota Banca Aceh. Jurnal Pendidikan Geosfer. Vol. 5 No. 2.
- [6] Normelani., Kumalawati Rosalina., Kartika Norma Yuni., Nugroho Arif Rahman., Riadi Selamat., Efendi Muhammad. (2020) *Program Kampung Iklim (Tinjauan Persepsi Masyarakat Kota Banjarmasin)*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press
- [7] Nurpeni, N., Aguswan, A., & Astuti, W. (2022). Development of the climate village program in tobek godang sub-district, Pekanbaru city at 2020-2021. *Sosiohumaniora*, 24(2), 193-198.
- [8] Pemerintah Kelurahan Tobek Godang. 2017. Profil Kelurahan Tobek Godang. Pekanbaru
- [9] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim (ProKlim)
- [10] Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 84 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1 tentang Instruksi Gubernur Riau Nomor 1/INS/I/2017 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Lokasi Program Kampung Iklim Provinsi Riau
- [11] Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim
- [12] Saputra, T., Nurpeni, E., & Zuhdi, S. (2024). Mapping power dynamics in local climate action: Policy networks in the climate village program of Pekanbaru City, Riau. *Chall. Sustain*, 12(4), 237-254.
- [13] Saputra, T., & Handoko, V. R. (2025). Dynamics Of Collaborative Governance In Indonesian Sustainable Waste Management. *Вопросы государственного и муниципального управления*, (6), 43-60.